



EKOWISATA DALAM PERSPEKTIF ETIKA UTILITARIANISME BENTHAM

Eko Sugiarto

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

ekosugiarto@stipram.ac.id

Keywords:

Ecotourism;
Perspective;
Utilitarianism
Ethics.

Accepted: 07-01-2023

Revised: 28-03-2023

Approved: 31-03-2023

ABSTRACT

This research is a literature research that aims to find out the principles of ecotourism in the perspective of utilitarianism ethics. Data were collected from various literatures on ecotourism and utilitarianism ethics. Data analysis was conducted by comparing the TIES ecotourism principles and Bentham's utilitarianism ethics principles. The conclusion of this research is that ecotourism in the perspective of utilitarianism ethics is seen as something good because the main principles of ecotourism and its derivative principles are in line with the main principles of utilitarianism ethics and the criteria of goodness in the perspective of utilitarianism ethics. The 2nd principle of ecotourism (build environmental and cultural awareness, and respect), the 4th principle of ecotourism (produce direct financial benefits for conservation), and the 8th principle of ecotourism (recognize the rights and spiritual beliefs of the Indigenous People in your community and work in partnership with them to create empowerment) align with Bentham's first criterion of utilitarianism, namely benefits. The 1st principle of ecotourism (minimize physical, social, behavioral, and psychological impacts) and the 7th principle of ecotourism (design, construct and operate low-impact facilities) align with Bentham's second criterion of utilitarianism, namely the greatest benefit. Ecotourism's 3rd principle (provide positive experiences for both visitors and hosts), 5th principle (Generate financial benefits for both local people and private industry), and 6th principle (Deliver memorable interpretative experiences to visitors that help raise sensitivity to host countries' political, environmental, and social climates) align with Bentham's third criterion of utilitarianism, which is the greatest benefit to the greatest number of people.

Kata Kunci:

Ekowisata;
Perspektif; Etika
Utilitarianisme.

Diterima: 07-01-2023

Direvisi: 28-03-2023

Disetujui: 31-03-2023

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bertujuan mengetahui prinsip-prinsip ekowisata dalam perspektif etika utilitarianisme. Data dikumpulkan dari berbagai literatur tentang ekowisata dan etika utilitarianisme. Analisis data dilakukan dengan membandingkan prinsip ekowisata TIES dan prinsip etika utilitarianisme Bentham. Simpulan penelitian ini adalah ekowisata dalam perspektif etika utilitarianisme dipandang sebagai sesuatu yang baik karena prinsip utama ekowisata maupun prinsip-prinsip turunannya selaras dengan prinsip utama etika utilitarianisme serta kriteria-kriteria kebaikan dalam perspektif etika utilitarianisme. Prinsip ke-2 ekowisata (membangun kesadaran lingkungan dan

budaya serta rasa hormat), prinsip ke-4 ekowisata (menghasilkan manfaat keuangan secara langsung untuk konservasi), dan prinsip ke-8 ekowisata (mengenal hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan) selaras dengan kriteria pertama utilitarianisme Bentham, yaitu manfaat. Prinsip ke-1 ekowisata (meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis) dan prinsip ke-7 ekowisata (mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah) selaras dengan kriteria kedua utilitarianisme Bentham, yaitu manfaat terbesar. Prinsip ke-3 ekowisata (memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah), prinsip ke-5 (menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta), dan prinsip ke-6 (memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara) selaras dengan kriteria ketiga utilitarianisme Bentham, yaitu manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

I. PENDAHULUAN

Istilah ekowisata didefinisikan sebagai wisata berbasis alam. Sejak tahun 1990, ekowisata oleh berbagai pihak juga telah diformulasikan dan dipelajari sebagai suatu alat pembangunan berkelanjutan yang merupakan subkomponen pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan infrastruktur pariwisata serta aktivitas lainnya harus ditekankan kepada kriteria berkelanjutan, baik berkelanjutan secara lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi (Wood, 2002).

Ekowisata sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan juga pernah dibahas oleh Roxas dkk. (2018). Menurut Roxas dkk. ekowisata dianggap sebagai bentuk dan ekspresi dari pariwisata berkelanjutan karena dalam ekowisata sumber daya alam dilestarikan, pendidikan lingkungan dan etika diamati, masyarakat setempat terlibat, budaya, pengetahuan dan praktik adat dihormati, serta manfaat ekonomi diberikan untuk peningkatan kehidupan masyarakat dan kepuasan pengunjung.

Ada dua kegiatan yang bisa disebut sebagai tonggak awal kelahiran ekowisata. Pertama, simposium internasional pertama tentang ekowisata yang digelar pada 17-19 April 1989 di Merida, Meksiko. Kedua, simposium internasional kedua tentang ekowisata dan konservasi sumber daya yang digelar pada 27 November sampai 2 Desember 1990 di Miami, Florida, Amerika Serikat. Makalah dari kedua simposium internasional tersebut kemudian dibukukan menjadi dua volume dengan judul *Ecotourism and Resource Conservation*. Jon Kusler adalah editor buku tersebut (Kodhyat, 1996).

Sepuluh tahun pascasimposium internasional pertama, Sirakaya dkk. (1999) mengumpulkan definisi ekowisata dari 20 penulis yang ditulis dalam kurun waktu 1987-1996. Sirakaya dkk. menyatakan bahwa definisi-definisi yang berhasil mereka kumpulkan tersebut umumnya bersifat normatif dan diformulasikan oleh para konservasionis, organisasi profesional, atau oleh akademisi berdasarkan pengamatan (studi) mereka terhadap perilaku wisatawan. Meskipun demikian, definisi-definisi tersebut tetap berguna dalam meningkatkan pemahaman tentang ekowisata.

Salah satu definisi ekowisata yang dirumuskan oleh Masyarakat Ekowisata Internasional atau *The International Ecotourism Society* (TIES) pada tahun 1990 adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami dengan

cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal (Kodhyat, 1996; Wood, 2002; Suwanto, 2004; Damanik dan Weber, 2006; Nugroho, 2011; TIES, 2015). Seiring berjalannya waktu, TIES merevisi definisi tersebut pada tahun 2015.

Dalam siaran pers bertanggal 7 Januari 2015 yang dimuat di situs web TIES, disebutkan bahwa para ahli ekowisata dari seluruh dunia bersama-sama mengevaluasi kembali prinsip-prinsip ekowisata TIES dan kemudian melakukan perubahan kecil dan penambahan baik pada prinsip-prinsip maupun definisi ekowisata. Definisi ekowisata setelah direvisi menurut TIES menjadi “perjalanan bertanggung jawab ke daerah-daerah atau area alami (*natural areas*) yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, serta melibatkan interpretasi dan pendidikan”. Menurut TIES definisi ekowisata yang dikemukakan TIES selama ini (sebelum direvisi) dirasa kurang lengkap karena hanya mencakup dua dari tiga pilar, yaitu konservasi dan komunitas/masyarakat lokal. Sejak direvisi pada tahun 2015, interpretasi mendapatkan tempat dalam ekowisata.

Setelah revisi definisi ekowisata versi TIES pada 1 Januari 2015, prinsip-prinsip ekowisata juga ikut berubah. Ada delapan prinsip yang dianggap sebagai “prinsip-prinsip terbaru” dalam ekowisata. Pertama, meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis. Kedua, membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta rasa hormat. Ketiga, memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah. Keempat, menghasilkan manfaat keuangan secara langsung untuk konservasi. Kelima, menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta. Keenam, memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara. Ketujuh, mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah. Kedelapan, mengenali hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan.

Jika dicermati secara saksama, delapan prinsip yang dianggap sebagai “prinsip-prinsip terbaru” dalam ekowisata di atas berakar dari permasalahan berupa dampak negatif yang muncul dari kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, ekowisata hadir dengan harapan dapat meminimalkan berbagai dampak negatif pariwisata dan memaksimalkan dampak positif pariwisata. Kehadiran ekowisata yang secara prinsip merupakan sebuah upaya untuk meminimalkan berbagai dampak negatif pariwisata dan memaksimalkan dampak positif pariwisata inilah yang jika disandingkan dengan etika utilitarianisme lebih kurang selaras dengan prinsip dalam etika utilitarianisme.

Tulisan ini coba menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah “prinsip-prinsip terbaru” ekowisata ini dalam perspektif etika utilitarianisme Bentham? Secara lebih rinci lagi, apakah prinsip-prinsip yang ada dalam ekowisata sebagai sebuah konsep pariwisata berkelanjutan selaras atau justru sebaliknya dengan prinsip-prinsip etika utilitarianisme Bentham? Utilitarianisme Bentham dipilih karena pemikiran Bentham merupakan sumber atau inspirasi bagi kemunculan pemikiran dari tokoh-tokoh utilitarianisme lain.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bertujuan mengetahui prinsip-prinsip ekowisata dalam perspektif etika utilitarianisme. Data

dikumpulkan dari berbagai literatur tentang ekowisata dan etika utilitarianisme. Analisis data dilakukan dengan membandingkan prinsip ekowisata TIES dan prinsip etika utilitarianisme Bentham. Hasil analisis data ini kemudian disimpulkan dan disajikan dalam bentuk teks naratif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Perspektif

Perspektif (*perspective*) sering dipadankan dengan berbagai istilah yang dianggap bermakna hampir sama. Ahimsa-Putra (2012) menuliskan bahwa “perspektif” terkadang disebut dengan istilah sudut pandang (*point of view*), kerangka konseptual (*conceptual framework*), kerangka pemikiran (*frame of thinking*), kerangka analitis (*analytical framework*), aliran pemikiran (*school of thought*), pendekatan (*approach*), dan paradigma (*paradigm*).

Kata perspektif menurut Ten Thije (dalam Widharyanto, 2016), sudah digunakan sejak abad pertengahan sebagai istilah teknis dalam cabang khusus ilmu terapan, yaitu optik. Kata perspektif berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu *perspicere*, yang berarti “mengamati secara akurat”. Konsep perspektif ini kemudian dipahami sebagai “doktrin atau ajaran mengamati secara akurat” hingga pada zaman *Renaissance*. Dalam perkembangannya, Leibniz (1646-1716) adalah sarjana yang memperkenalkan gagasan perspektif ini dalam bidang filsafat. Leibniz merumuskan gagasan bahwa setiap representasi bergantung kepada sudut pandang pengamat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima memadankan istilah “perspektif” dengan “sudut pandang” (Tim Penyusun Kamus Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sementara Toni (2016) mendefinisikan perspektif sebagai suatu kerangka konseptual, suatu perangkat asumsi, nilai atau gagasan yang memengaruhi persepsi dan pada akhirnya memengaruhi cara bertindak dalam suatu situasi.

Karena perspektif mengacu kepada “sudut pandang”, kemungkinan besar dia hanya bisa “menangkap” sebagian dari fenomena empiris dari “sudut tertentu”. Hampir tidak mungkin sebuah “perspektif” dapat menangkap keseluruhan fenomena empiris yang diamati karena perspektif bersifat terbatas. Dengan sebuah perspektif, manusia hanya mungkin melihat “fenomena empiris” yang ada di luar dirinya dari satu sisi saja. Demikian juga dengan “fenomena ekowisata” yang dalam tulisan ini dilihat dari perspektif etika utilitarianisme Bentham.

3.2 Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Tim Penyusun Kamus Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Makna etika yang dipadankan dengan makna moral menurut Aprita dan Adhitya (2020) bukanlah hal yang keliru, tetapi kurang tepat. Hal ini menurut Aprita dan Adhitya karena makna etika lebih luas daripada makna moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas kepada sikap tindak seseorang, tetapi mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut, sementara moral terbatas kepada sikap tindak lahiriah seseorang.

Terlepas dari tepat atau tidak pemadanan istilah etika dan moral, ada satu pertanyaan yang kemudian muncul dari pengertian di atas, yaitu bagaimana

sebenarnya sifat “baik” dan “buruk” dalam etika? Dengan kata lain, apa standar untuk menilai “baik” dan “buruk” dalam etika?

Salah satu teori dalam etika yang digunakan untuk menentukan standar tindakan yang “baik” dan “buruk” adalah etika teleologis. Istilah “teleologi”, seperti ditulis oleh Keraf (2010), berasal dari kata Yunani, yaitu *telos* (tujuan) dan *logos* (ilmu atau teori). Menurut teori etika teleologis, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dianggap baik jika memiliki niat baik dan membawa hasil yang baik sehingga etika teleologis lebih bersifat situasional dan subjektif. Kita dapat bertindak secara berbeda dalam situasi lain, bergantung kepada penilaian kita terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut. Suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral dapat dibenarkan oleh etika teleologis hanya karena tindakan tersebut membawa akibat yang baik. Pertanyaannya adalah untuk siapa alasan yang baik? Bagi kita pribadi, bagi mereka yang mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan, atau bagi banyak orang? Apakah tindakan tertentu dianggap baik hanya karena baik bagi kita atau baik bagi banyak orang? Berdasarkan jawaban atas pertanyaan tersebut, etika teleologis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme.

Egoisme etis, seperti ditulis Keraf (2010), menilai suatu tindakan baik karena memiliki akibat yang baik bagi pelakunya. Meskipun egois, tindakan ini dinilai baik secara moral karena setiap orang berhak mengejar kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri akan dinilai sebagai sebuah perbuatan baik secara moral. Sebaliknya, akan dinilai buruk jika kita membiarkan diri kita menderita dan dirugikan.

Utilitarianisme didasarkan kepada keyakinan bahwa suatu tindakan itu baik atau benar jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Keraf (2010) menulis bahwa etika utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832).

Jeremy Bentham merupakan filsuf, ahli hukum, dan reformis sosial asal Inggris. Dia lahir pada 15 Februari 1748 di London dan memulai pendidikannya di Westminster School. Prestasinya yang menonjol selama menempuh pendidikan di sekolah ini adalah di bidang bahasa Yunani dan bahasa Latin. Tahun 1760, Bentham melanjutkan pendidikan ke Queen College, Oxford, dan lulus pada November tahun 1763. Dia kemudian melanjutkan studi ke Lincoln' Inn. Tahun 1788, Bentham berupaya keras menemukan prinsip-prinsip legislasi. Tahun 1789 terbit sebuah karya berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Pada tahun 1792, Bentham mendapatkan kewarganegaraan Prancis. Pada tahun 1823, Bentham membantu pendirian *Westminster Review* (1824), jurnal utilitarian yang pertama. Pada 6 Juni 1832 Bentham meninggal dunia di Queen Square dalam usia 85 tahun (Septiansyah & Ghalib, 2018).

Karya-karya Bentham yang paling terkenal adalah *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), *Principles of Political Economy* (1789), dan *The Panopticon Writings* (1787-1791).

Bentham memaparkan prinsip kemanfaatan di dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang terbit pada tahun 1789 (ada juga versi tahun 2000 yang diterbitkan oleh Batoche Books). Dalam bukunya tersebut, Bentham menjelaskan bahwa tindakan yang

benar adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Definisi kegunaan (utilitas) menurut Bentham adalah segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis, bermula kepada perhatiannya yang besar terhadap kepentingan individu. Bentham berpendapat bahwa hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu, tidak langsung kepada masyarakat. Meskipun demikian, kepentingan masyarakat tetap dia perhatikan. Agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan, Bentham menyarankan pembatasan terhadap kepentingan individu. Dengan demikian, individu yang satu tidak menjadi pemangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Bentham juga menyatakan agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lain. Dengan demikian, akan tercipta kebahagiaan individu sehingga kebahagiaan dalam masyarakat akan terwujud dengan sendirinya (Kamarusdiana, 2018; Aprita & Adhitya, 2020).

Prinsip kemanfaatan ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa manusia cenderung mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau penderitaan. Oleh karena itu, tindakan yang menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang dan mengurangi penderitaan atau rasa sakit dianggap sebagai tindakan yang baik atau benar.

Menurut Bentham, prinsip kemanfaatan dapat diterapkan di berbagai bidang. Dalam bidang hukum, prinsip ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu undang-undang atau kebijakan hukum adil dan berkeadilan. Dalam bidang politik, prinsip ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan publik dapat memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin warga negara. Sedangkan dalam bidang ekonomi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bentham juga menekankan bahwa prinsip kemanfaatan bukan berarti mengabaikan kepentingan individu. Menurut Bentham, kepentingan individu tetap harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan, tetapi tetap harus mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemikiran Bentham mendapat tanggapan dari John Stuart Mill (1806-1873), tokoh utilitarianisme yang lain. Dalam karya berjudul *Utilitarianism*, Mill mengkritisi konsep dari Bentham. Ketidaktepahaman Mill dengan Bentham adalah dalam hal tolok ukur kuantitatif mengenai kebahagiaan dari banyak orang. Bagi Mill, tolok ukur kebahagiaan seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah (kuantitatif). Menurut Mill, kualitas kebahagiaan juga semestinya mendapatkan perhatian. Selain itu, Mill berpendapat bahwa kesejahteraan atau kesenangan secara lahir dan batin harus dimiliki oleh semua dalam konteks masyarakat, tidak hanya berlaku untuk individual semata (Saepullah, 2020).

Meskipun dalam hal tolok ukur mengenai kebahagiaan berbeda dengan Bentham, pendapat Mill tentang tujuan manusia tetap sama dengan pandangan yang diungkapkan Bentham, yaitu kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu, tetapi yang ingin dicapai manusia bukanlah benda, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkan oleh benda tersebut (Aprita & Adhitya, 2020). Menurut Mill “tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian

kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan” (Ali dalam Septiansyah & Ghalib, 2018; Efendi & Susanti, 2021).

Tokoh terkemuka aliran utilitarianisme selain Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah Rudolf von Jhering (1818-1892). Jika ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme individual, Von Jhering (dalam beberapa buku ditulis Lehering) mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Von Jhering mengembangkan teori yang bersumber dari teori Bentham, Stuart Mill, dan positivisme dari Jhon Austin (Septiansyah & Ghalib, 2018). Von Jhering mengikuti pendapat Bentham dengan mendefinisikan kepentingan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Definisi “kepentingan” semacam ini menurut Von Jhering adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh hukum (Septiansyah & Ghalib, 2018; Aprita & Adhitya, 2020).

Dari ketiga tokoh utilitarianisme terkemuka di atas, terlihat bahwa pemikiran Bentham merupakan sumber atau inspirasi bagi kemunculan pemikiran dari tokoh-tokoh lain. Inti dari aliran utilitarianisme adalah “kemanfaatan” dan hal ini dinilai dari dua faktor penting, yaitu kesenangan dan kesakitan/rasa sakit. Dengan melihat dua faktor penting inilah menurut Bentham perilaku manusia dapat dijelaskan (Chandra, 2016).

Alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan dua tuan yang berdaulat, yaitu rasa sakit dan kesenangan (Bentham, 2010). Dua hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi kita dalam memutuskan apa yang harus kita lakukan sekaligus apa yang akan kita lakukan. Bentham menyebutnya sebagai “Prinsip Kegunaan” (*Principle of Utility*), yaitu prinsip yang menyetujui atau tidak menyetujui setiap tindakan menurut apakah tindakan tersebut dapat menambah atau mengurangi kebahagiaan para pihak yang terlibat. Kebaikan suatu perbuatan dinilai dari seberapa besar kesenangan (manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan) dan kesedihan (kerusakan, rasa sakit, kejahatan, atau ketidakbahagiaan) yang ditimbulkannya. Etika menurut Bentham pada umumnya dapat didefinisikan sebagai seni mengarahkan tindakan manusia untuk menghasilkan jumlah kebahagiaan yang sebesar mungkin.

Utilitarianisme adalah prinsip yang menyatakan bahwa tindakan terbaik yang harus diambil adalah tindakan yang akan menghasilkan kebaikan atau kebahagiaan bagi kebanyakan orang. Salah satu prinsip etika utilitarianisme adalah “prinsip kebahagiaan maksimum” atau “prinsip kegunaan” (Chandra, 2016). Bagi penganut teori Bentham dan utilitarian, dasar objektif suatu kebijakan atau tindakan publik adalah manfaat yang ditimbulkan oleh kebijakan atau tindakan tersebut bagi banyak orang. Secara lebih rinci hal ini dapat dibagi menjadi tiga kriteria (Keraf, 2010).

Kriteria pertama adalah manfaat. Dalam etika utilitarianisme kebijakan atau tindakan baik adalah kebijakan atau tindakan yang bermanfaat atau menghasilkan hal baik. Sebaliknya, kebijakan atau tindakan akan dinilai buruk jika mendatangkan kerugian atau hal buruk.

Kriteria kedua adalah manfaat terbesar. Dalam etika utilitarianisme, kebijakan atau tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat lebih besar atau terbesar dibanding kebijakan atau tindakan alternatif lain. Jika semua alternatif sama-sama merugikan, tindakan yang baik adalah yang paling sedikit merugikan.

Kriteria ketiga adalah manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam etika utilitarianisme, kebijakan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan manfaat terbesar dan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang menikmati manfaat atau akibat yang menguntungkan dari suatu kebijakan atau tindakan, semakin baik kebijakan atau tindakan tersebut. Jika semua kebijakan atau tindakan sama-sama bermanfaat, pilih yang manfaatnya terbesar dan di antara yang manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya bisa dinikmati paling banyak orang.

3.3 Ekowisata dalam Perspektif Etika Utilitarianisme Bentham

Prinsip utama dalam etika utilitarianisme adalah “prinsip kebahagiaan terbesar” atau “prinsip kegunaan” yang intinya adalah sesuatu dianggap baik jika mendatangkan manfaat/kegunaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang, sementara prinsip utama dalam ekowisata adalah “memaksimalkan dampak positif pariwisata dan meminimalkan dampak negatif pariwisata”. Dalam perspektif etika utilitarianisme, prinsip utama ekowisata ini selaras dengan asumsi dasar utilitarianisme yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dengan mengacu pada dua motif, yaitu kesenangan dan kesakitan/rasa sakit. Kebaikan diartikan sebagai manfaat/keuntungan dan manfaat di sini diartikan sebagai apa yang menghasilkan kesenangan dan mengurangi kesakitan. Dengan demikian, ekowisata dalam perspektif etika utilitarianisme merupakan sesuatu yang baik karena prinsip utama dalam ekowisata selaras dengan prinsip utama etika utilitarianisme, yaitu menghasilkan kesenangan (meningkatkan dampak positif pariwisata) dan mengurangi kesakitan (meminimalkan dampak negatif pariwisata).

Dari prinsip utama di atas, jika diturunkan ke dalam prinsip-prinsip yang lebih operasional baik prinsip-prinsip dalam ekowisata maupun prinsip-prinsip yang disebut sebagai kriteria kebaikan dalam etika utilitarianisme, diperoleh gambaran seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan antara Prinsip-Prinsip Ekowisata dan Kriteria Kebaikan dalam Etika Utilitarianisme

No	Prinsip-Prinsip dalam Ekowisata	Kriteria Kebaikan dalam Etika Utilitarianisme
1	Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis.	Kriteria 2 (manfaat terbesar).
2	Membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta rasa hormat.	Kriteria 1 (manfaat).
3	Memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah.	Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang).
4	Menghasilkan manfaat keuangan secara langsung untuk konservasi.	Kriteria 1 (manfaat).
5	Menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta.	Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang).
6	Memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara.	Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang).
7	Mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah.	Kriteria 2 (manfaat terbesar).

No	Prinsip-Prinsip dalam Ekowisata	Kriteria Kebaikan dalam Etika Utilitarianisme
8	Mengenali hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan.	Kriteria 1 (manfaat).

Sumber: Hasil olah data

Keterangan:

Kriteria 1 (manfaat): bermanfaat atau menghasilkan hal baik.

Kriteria 2 (manfaat terbesar): mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lain. Jika semua alternatif yang ada ternyata sama-sama mendatangkan kerugian, tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian terkecil.

Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang): memberikan manfaat terbesar dan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang menikmati manfaat atau akibat baik maka semakin baik. Jika semua sama-sama mendatangkan manfaat, pilih yang manfaatnya terbesar dan di antara yang manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya bisa dinikmati paling banyak orang.

Kedelapan prinsip ekowisata di atas dalam perspektif kriteria kebaikan etika utilitarianisme terpenuhi. Ada prinsip ekowisata yang memenuhi kriteria 1, kriteria 2, atau kriteria 3.

Kriteria 1 (manfaat) etika utilitarianisme Bentham ditemukan dalam prinsip ke-2, prinsip ke-4, dan prinsip ke-8 ekowisata TIES. Dalam etika utilitarianisme Bentham, tindakan baik adalah tindakan yang bermanfaat atau menghasilkan hal baik. Sebaliknya, kebijakan atau tindakan akan dinilai buruk jika mendatangkan kerugian atau hal buruk.

Prinsip ke-2 ekowisata TIES adalah membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta rasa hormat. Hasil dari upaya mewujudkan prinsip ke-2 ekowisata TIES ini akan bermanfaat bagi kelestarian (konservasi) alam dan budaya. Contoh penerapan prinsip ke-2 ekowisata TIES dapat ditemukan di Ekowisata Bukit Cemeng yang ada di Bali dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masyarakat Desa Sidembunut, Bangli. Visi Ekowisata Bukit Cemeng adalah melakukan upaya konservasi alam dan budaya serta pemberdayaan masyarakat lokal sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana*. Penerapan prinsip ke-2 ekowisata salah satunya diwujudkan oleh pihak pengelola dengan senantiasa mengadakan upacara/ritual keagamaan pada hari-hari suci umat Hindu di Bali sebagai upacara persembahkan puji syukur ke hadapan Tuhan yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Selain itu, pengelola juga memasang rambu-rambu untuk wisatawan yang berkunjung, misalnya larangan berkata-kata kotor dan larangan memasuki areal Pura Pucak Cemeng bagi wisatawan yang sedang haid dan berbela sungkawa (Wiwin, 2021). Semua upaya tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta rasa hormat sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana*. Hal ini akan bermanfaat atau menghasilkan hal baik bagi keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*) yang merupakan salah satu aspek *Tri Hita Karana*.

Prinsip ke-4 ekowisata TIES adalah menghasilkan manfaat keuangan secara langsung untuk konservasi. Prinsip ini secara jelas menyebutkan “manfaat” keuangan secara langsung, lagi-lagi bagi konservasi. Contoh

penerapan prinsip ke-4 ekowisata TIES ini antara lain dilakukan Kelompok Tani Hutan (KTH) “Wana Paksi” di Gunung kelir, Kalurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, DI Yogyakarta. KTH “Wana Paksi” memiliki program antara lain berupa paket wisata edukasi hutan rakyat, paket wisata pengamatan burung, dan adopsi sarang burung (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2020).

Adopsi sarang burung oleh wisatawan adalah salah satu yang unik. Dalam program ini, wisatawan bisa memilih paket yang ditawarkan. Paket pertama (Rp 1.500.000,-) untuk burung yang populasinya berkurang dan terancam punah. Paket kedua (Rp 1.000.000,-) untuk jenis burung pemangsa, burung berkicau, dan burung lain yang populasinya mulai berkurang. Paket ketiga (Rp 800.000,-) untuk kelompok burung endemik dan burung berkicau yang tergolong masih sering ditemui. Uang yang terkumpul dari adopsi sarang burung ini dipakai untuk berbagai keperluan operasional, misalnya, piket rutin untuk memantau perkembangan anakan burung. Sebagian juga dipakai untuk kas dan insentif bagi pemilik lahan dan penemu sarang. Ada sembilan spesies burung yang jadi prioritas burung untuk program adopsi sarang, termasuk burung yang dengan nama lokal dikenal dengan Empuloh Janggut, Sikatan Cacing, Elang-ular Bido, dan Elang-alap Jambul (Handoko, 2022).

Prinsip ke-8 ekowisata adalah mengenali hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan. Selain hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas, salah satu kata kunci dalam prinsip ke-8 ekowisata TIES ini adalah “kemitraan”. Hal ini berarti bahwa selain hak dan keyakinan spiritual warga setempat yang mesti dikenali (seperti pada Ekowisata Bukit Cemeng yang ada di Bali sebagaimana sudah dicontohkan sebelumnya), pelibatan masyarakat setempat dalam konteks relasi kemitraan untuk pemberdayaan adalah hal yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat dalam konteks ekowisata adalah mitra yang diajak untuk secara bersama-sama menjadi lebih berdaya (bermanfaat) bagi kehidupan dan lingkungan mereka sendiri.

Salah satu model kemitraan semacam ini bisa ditemukan dalam pengelolaan ekowisata bahari di Pantai Teupin Layeu Iboih, Kota Sabang, Aceh. Seluruh kegiatan pariwisata di ekowisata bahari Pantai Teupin Layeu Iboih melibatkan masyarakat lokal baik sebagai pemilik (*local ownership*) maupun sebagai pengelola dan pemandu wisata (*guide*) karena masyarakat dipandang lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, dan sebagainya. Pemeliharaan objek wisata juga menjadi tanggung jawab warga, termasuk penentuan biaya untuk wisatawan. Kemitraan di ekowisata bahari ini merupakan bentuk relasi sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*), kemandirian, dan kesetaraan dalam peran dan posisi untuk mencapai tujuan bersama. Inti dari kemitraan adalah pihak yang terlibat saling berbagi kekuatan, tanggung jawab, dan capaian hasil (Aswita, Samuda, & Andalia, 2017).

Kriteria 2 (manfaat terbesar) etika utilitarianisme Bentham ditemukan dalam prinsip ke-1 dan prinsip ke-7 ekowisata TIES. Dalam etika utilitarianisme Bentham, tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat lebih besar atau terbesar dibanding kebijakan atau tindakan alternatif lain. Jika semua alternatif sama-sama merugikan, tindakan yang baik adalah yang paling sedikit merugikan.

Prinsip ke-1 ekowisata, yaitu meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis serta prinsip ke-7 ekowisata, yaitu mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah sebenarnya saling terkait. Ketika prinsip ke-7 diterapkan dengan sebaik mungkin, prinsip ke-1 akan bisa terwujud dengan sendirinya. Kata kunci prinsip ke-1 dan prinsip ke-7 ini adalah “dampak” (negatif) pariwisata.

Contoh penerapan prinsip ke-1 dan ke-7 ekowisata ini bisa kita temukan di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran pada tahun 2014 ketika terjadi puncak kunjungan wisatawan yang menyebabkan sumber mata air mengering dan menyebabkan masyarakat kekurangan air. Untuk mengurangi dampak tersebut, antara lain dilakukan penanaman pohon yang memiliki kandungan air tinggi serta dan mengedukasi wisatawan agar bijak dalam menggunakan air (Tiani & Baiquni, 2018).

Selain masalah air, sampah menjadi persoalan yang juga perlu segera ditangani ketika itu. Untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh sampah, pengelola kawasan ekowisata menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya. Selain itu, pengelola memasang rambu dilarang membuang sampah sembarangan (Tiani & Baiquni, 2018).

Upaya yang cukup menarik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah pembatasan jumlah pengunjung. Ketika destinasi pariwisata umumnya berlomba-lomba menarik wisatawan untuk berkunjung, pengelola Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran justru membatasi jumlah pengunjung.

Data kunjungan wisatawan di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2012-2014, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Total kunjungan wisatawan tahun 2012 adalah 27.875 wisatawan (27.675 wisnus dan 200 wisman), tahun 2013 total 85.658 wisatawan (85.424 wisnus dan 234 wisman), dan tahun 2014 total 325.303 wisatawan (324.827 wisnus dan 476 wisman). Jumlah kunjungan yang terus meningkat tersebut menimbulkan dampak negatif berupa sampah dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelola mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah wisatawan. Langkah yang ditempuh pengelola berhasil menurunkan jumlah wisatawan sehingga pada tahun 2015 total pengunjung adalah 255.917 dengan rincian 255.388 wisnus dan 529 wisman atau turun 21,32% (Jamalina & Wardani (2017).

Meskipun total kunjungan turun, omset pengelolaan justru naik, yaitu dari Rp 81.225.000,- (2012), Rp 424.690.000,- (2013), dan Rp 1.422.915.000,- (2014) menjadi Rp 1.541.990.000,- pada tahun 2015 ketika angka kunjungan turun (Jamalina & Wardani, 2017). Bahkan pada tahun 2016 dan 2017 jumlah total kunjungan terus turun, yaitu 172.863 wisatawan (2016) dan 151.035 wisatawan (2017) dengan rincian 171.306 wisnus dan 1.557 wisman pada tahun 2016 serta 149.241 wisnus dan 1.794 wisman pada tahun 2017. Sama dengan tahun 2015, omset pengelolaan pada tahun 2016 dan 2017 justru naik terus naik, yaitu menjadi Rp 1.801.710.500,- pada tahun 2016 dan Rp 1.963.455.000,- pada tahun 2017 (Tiani & Baiquni, 2018).

Kunjungan wisatawan ke Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2012-2014 dan kemudian merosot pada tahun 2015-2017 bukan karena minat kunjungan wisatawan menurun, melainkan karena pengelola memang melakukan pembatasan jumlah wisatawan guna mendukung konsep ekowisata yang

diusung. Pembatasan jumlah wisatawan ini dilakukan dengan cara menaikkan harga tiket masuk objek wisata dan menggiatkan promosi paket *live-in*. Upaya segmentasi pasar wisatawan yang berkunjung ini diharapkan dapat lebih menyadarkan berbagai pihak yang terlibat terhadap arti penting menjaga alam dan konservasi lingkungan, dibandingkan dengan sekadar wisata yang murah tanpa peduli keberlanjutan lingkungan (Tiani & Baiquni, 2018). Pembatasan jumlah kunjungan wisatawan yang dilakukan pengelola Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran untuk menerapkan prinsip ke-1 sekaligus prinsip ke-7 ekowisata TIES yang telah diuraikan di atas selaras dengan kriteria ke-2 etika utilitarianisme Bentham, yaitu tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat lebih besar atau terbesar dibanding kebijakan atau tindakan alternatif lain.

Kriteria 3 (manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang) etika utilitarianisme Bentham ditemukan dalam prinsip ke-3, prinsip ke-5, dan prinsip ke-6 ekowisata TIES. Dalam etika utilitarianisme Bentham, tindakan yang baik adalah yang memberikan manfaat terbesar dan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang menikmati manfaat atau akibat baik maka semakin baik. Jika semua sama-sama mendapatkan manfaat, pilih yang manfaatnya terbesar dan di antara yang manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya bisa dinikmati paling banyak orang.

Prinsip ke-3 ekowisata TIES adalah memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah. Prinsip ke-5 ekowisata TIES adalah menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta. Prinsip ke-6 ekowisata TIES adalah memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara. Ketiga prinsip (prinsip ke-3, ke-5, dan ke-6 ekowisata TIES) ini berusaha menempatkan wisatawan dan winisatawan (tuan rumah) dalam posisi yang setara. Artinya, manfaat ekowisata harus bisa dinikmati bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, baik wisatawan maupun winisatawan harus sama-sama mendapatkan manfaat dalam kegiatan ekowisata. Hampir semua destinasi pariwisata yang mengkalim diri sebagai destinasi ekowisata idealnya telah menerapkan ketiga prinsip ini.

Ada ide menarik yang dilakukan Kaihatu dkk. (2021) terkait prinsip ke-3, ke-5, dan ke-6 ekowisata TIES ini. Ide tersebut berupa upaya pelestarian alat musik tradisional yang ada di Kampung Naga dalam bentuk pengadaan kursus alat musik tradisional bagi warga maupun non-warga dengan sistem berbayar untuk turis. Jika terlaksana, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pengunjung terhadap kesenian yang terdapat di Kampung Naga (prinsip ke-6 ekowisata TIES), memberikan manfaat keuangan bagi masyarakat Kampung Naga dan biro perjalanan wisata (prinsip ke-5 ekowisata TIES), sekaligus bisa memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah (prinsip ke-3 ekowisata TIES) akibat dari hasil interaksi di antara mereka selama kegiatan kursus.

IV. SIMPULAN

Ekowisata sebagai sebuah bentuk perjalanan bertanggung jawab ke daerah-daerah atau area alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, serta melibatkan interpretasi dan pendidikan adalah sebuah bentuk pariwisata yang selaras dengan pandangan etika utilitarianisme. Prinsip utama ekowisata adalah “memaksimalkan dampak positif pariwisata dan

meminimalkan dampak negatif pariwisata”. Dari prinsip utama ini kemudian diturunkan menjadi delapan prinsip. Dalam perspektif etika utilitarianisme Bentham, prinsip utama ekowisata maupun prinsip-prinsip turunannya selaras dengan asumsi dasar utilitarianisme yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dengan mengacu kepada dua motif, yaitu kesenangan dan kesakitan/rasa sakit. Kebaikan diartikan sebagai manfaat/keuntungan dan manfaat di sini diartikan sebagai apa yang menghasilkan kesenangan dan mengurangi kesakitan. Dengan demikian, ekowisata dalam perspektif etika utilitarianisme dipandang sebagai sesuatu yang baik karena prinsip utama ekowisata maupun prinsip-prinsip turunannya selaras dengan prinsip utama etika utilitarianisme serta kriteria-kriteria kebaikan dalam perspektif etika utilitarianisme.

Prinsip ke-2 ekowisata (membangun kesadaran lingkungan dan budaya serta rasa hormat), prinsip ke-4 ekowisata (menghasilkan manfaat keuangan secara langsung untuk konservasi), dan prinsip ke-8 ekowisata (mengenal hak dan keyakinan spiritual pribumi di komunitas dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk membuat kegiatan pemberdayaan) selaras dengan kriteria pertama utilitarianisme Bentham, yaitu manfaat. Prinsip ke-1 ekowisata (meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis) dan prinsip ke-7 ekowisata (mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah) selaras dengan kriteria kedua utilitarianisme Bentham, yaitu manfaat terbesar. Prinsip ke-3 ekowisata (memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah), prinsip ke-5 (menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta), dan prinsip ke-6 (memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan untuk pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk menjadi tuan rumah iklim politik, lingkungan, dan sosial negara-negara) selaras dengan kriteria ketiga utilitarianisme Bentham, yaitu manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama. *Walisongo*, 20(2), 271-304.
- Aprita, S. & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Aswita, D., Samuda, S., & Andalia, N. (2017). Strategi Pemanfaatan Komunitas Lokal Dalam Mendukung Pengelolaan Ekowisata Bahari Pantai Teupin Layeu Iboih. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2):159-167.
- Bentham, J. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books.
- Chandra, X. (2016). Bahan Ajar Sejarah Etika. Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala.
- Damanik, J. & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Kerja Sama Puspar UGM dan Penerbit Andi.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. (2020). *Buku Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo*.
- Efendi, A. & Susanti, D. O. (2021). *Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA.

- Handoko, T. (2022). Warga di Yogyakarta Ajak Masyarakat Adopsi Sarang Burung. Diakses 21 Maret 2023 dari <https://www.dw.com/id/pelestarian-burung-dengan-adopsi-sarang-burung-di-yogyakarta/a-61139238>.
- Jamalina, I. A. & Wardani, D. T. K. (2017). Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Konsep Community Based Tourism (CBT) dan Manfaat Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1):71-85.
- Kaihatu, T. S. (Editor). (2021). *Buku Ajar Model Ekowisata di Kalangan Milenial*. CV Bakul Buku Indonesia.
- Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kodhyat, H. (1996). *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, I. (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P., & Gutierrez, E. L. M. (2018). Framework for Creating Sustainable Tourism Using Systems Thinking. *Journal Current Issues in Tourism* (ABS 2), DOI: 10.1080/13683500.2018.1534805.
- Saepullah, S. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 11(2):243-261.
- Septiansyah, Z. B. & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 34(1):27-34.
- Sirakaya, E., Sasidharan V., and S. Sönmez (1999). Redefining Ecotourism: The Need for a Supply Side View. *Journal of Travel Research*, 38(2):168-172.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- The International Ecotourism Society. (2015). TIES Announces Ecotourism Principles Revision. Diakses pada tanggal 26 Juni 2022 dari <https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision>.
- Tiani, I. M. & Baiquni, M. (2018). Penerapan Prinsip Ekowisata di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Tim Penyusun Kamus Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Toni, A. (2016). Bisnis Media Pasca Matinya Televisi Nasional Dalam Perspektif Jurnalistik. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 36-50.

- Widharyanto, B. (2016). Fenomena Perspektif di Dalam Wacana Berita. *Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXVIII*. Sukoharjo: Univet Bantara.
- Wiwin, I. W. (2021). Implementasi Tri Hita Karana dalam Pengembangan Ekowisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Bukit Cemeng Kabupaten Bangli. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 11(02):353-368.
- Wood, M. E. (2002). *Ecotourism: Principles, Practices, and Policies for Sustainability*. Edisi Pertama. Kerja sama UNEP dan TIES.